

**IMPLEMENTANSI PANCASILA DALAM BIDANG AKUNTANSI****Fira Aisyah Meilani, Novika Sarmauli Panggabean, Yessi Octavia, Putri Ani,  
Dewi Pika Lbn Batu**

Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Negeri Medan

E-mail: [putriianiil610@gmail.com](mailto:putriianiil610@gmail.com)**Abstrak**

Bidang Akuntansi memegang peranan yang sangat krusial dan sangat penting dalam dunia ekonomi, sehingga perlu tuntutan untuk memahami Pancasila dan bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Pancasila dan nilai nilai yang terkandung didalamnya dalam membentuk karakter akuntan yang baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu literatur review. Sumber data dalam penelitian ini yaitu artikel ilmiah, buku, berita, dan sumber-sumber data lainnya yang dapat menjawab permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap semua data penelitian tersebut. Data dianalisis secara kualitatif Hasil penelitian ini menemukan bahwa perlu ada nya penerapan atau implementasi nilai nilai Pancasila dalam bidang akuntansi, sehingga akuntan harus memahami serta menelaah implementasi Pancasila. Implementasi nilai nilai yang dimaksud yaitu nilai (1) Ketuhanan yang Maha Esa (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab (3) Persatuan Indonesia (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia

Pancasila adalah pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan melalui semangat persaudaraan, pengangkatan derajat rakyat, serta keseimbangan antara jasmani dan rohani manusia di dalam aktivitas keuangan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa mengimplemetasikan pancasila dalam akuntansi memberikan berbagai banyak manfaat seperti; solidaritas, kepuasan batin, rasa senang, dan rasa syukur. Pancasila tidak hanya memusatkan perhatian dari segi materiil akan tetapi juga non-materiil. Penerapan pancasila terhadap akuntansi menunjukkan hubungan antara manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia terhadap sesamanya untuk mempertanggungjawabkan informasi mengenai laporan keuangan dan hal lainnya. Maka dari itu, melalui penerapan ini diharapkan dapat terciptanya kinerja akuntansi yang baik yang tidak hanya mementingkan ego diri sendiri tetapi juga mementingkan kepentingan masyarakat luas.

**Abstract**

The field of Accounting plays a very crucial and important role in the world of

economics, hence the demand to understand Pancasila and how its values are implemented. This research aims to analyze the role of Pancasila and the values contained within it in shaping good accountant's character. The method used in this research is a literature review. The data sources in this research are scientific articles, books, news, and other data sources that can answer the examined issues. Data collection techniques involve examining all the research data. The data is analyzed qualitatively. The research findings indicate the need for the implementation of Pancasila values in the field of accounting, so accountants must understand and examine the implementation of Pancasila. The values to be implemented are (1) Belief in the One and Only God, (2) Just and civilized humanity, (3) The Unity of Indonesia, (4) Democracy led by the wisdom of deliberation among representatives, and (5) Social Justice for all Indonesian people.

Pancasila is the accountability of humans to God through the spirit of brotherhood, the elevation of people's dignity, and the balance between the material and spiritual aspects of human activities in finance. Thus, it can be concluded that implementing Pancasila in accounting provides various benefits such as solidarity, inner satisfaction, joy, and gratitude. Pancasila not only focuses on material aspects but also non-material ones. The implementation of Pancasila in accounting shows the relationship between humans and the One and Only God and humans with each other to be accountable for information regarding financial reports and other matters. Therefore, it is hoped that through this implementation, good accounting performance can be achieved that not only prioritizes one's own ego but also considers the interests of the wider community.

***Kata Kunci: Implementasi, Pancasila, Akuntansi***

## **PENDAHULUAN**

Rumusan dasar negara Indonesia merdeka mulai dibahas pada sidang pertama BPUPK (29 Mei – 1 Juni 1945). Anggota BPUPK menyampaikan pandangannya terhadap nilai-nilai sakral, kemanusiaan, solidaritas, demokrasi deliberatif, dan keadilan/kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip yang diajukan pada saat itu masih bersifat abstrak, belum ada yang membangunnya secara sistematis dan komprehensif sebagai landasan negara yang koheren. Namun pandangan-pandangan tersebut memberikan masukan penting bagi Soekarno untuk membentuknya nanti.

Soekarno memberikan jawaban atas dasar negara Indonesia dalam kerangka "filsafat pendiri" (Philosofische Grondslag) atau "Pandangan Dunia" (weltanschauung) Kelima prinsip ini disebut Panca Sila. "Sila artinya asas atau landasan, dan atas dasar lima landasan itulah kita mendirikan negara Indonesia" Soekarno menyebut urutan lima sila sebagai tatanan yang berurutan dan bukan tatanan prioritas. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, diandaikan dan diartikulasikan satu sama lain. Setiap tahapan konsep Pancasila melibatkan banyak partisipasi dan unsur yang berbeda. Oleh karena itu, Pancasila sesungguhnya merupakan karya kolektif bangsa.

Sejak disahkannya konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dianggap sebagai landasan (filsafat) negara, pedoman hidup, ideologi nasional, dan pemersatu (persatuan) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila merupakan landasan solidaritas yang statis sekaligus bintang penuntun yang dinamis (Leitstar), yang mengarahkan bangsa untuk mencapai tujuannya. Dalam posisi itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan arah keamanan bangsa. Dengan demikian, negara Indonesia mempunyai landasan moral dan arah kebangsaan yang jelas dan visioner. Hal tersebut merupakan titik tolak dan tujuan penting yang membawa harapan bagi kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa.

## LANDASAN TEORI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akuntansi adalah teori dan praktek pencatatan transaksi keuangan dan menjelaskan transaksi dengan kegiatan yang berkaitan dengan akuntan. Akuntan adalah seseorang yang melakukan proses akuntansi mulai dari transaksi hingga pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Namun jika terjadi kesalahan dalam proses pengambilan keputusan, maka akuntanlah yang akan disalahkan terlebih dahulu karena kinerjanya dianggap tidak tepat. Dari situlah akan timbul keraguan di mata masyarakat terhadap kerja akuntan.

Oleh karena itu, seorang akuntan harus jujur dan transparan dalam dunia kerjanya. Dari sini terlihat adanya keterkaitan antara nilai Pancasila dengan akuntansi. Kualitas yang harus dimiliki seorang akuntan adalah kejujuran dalam tindakan dan perilakunya. Seorang akuntan harus mewaspadaikan praktik kecurangan karena dalam menyusun laporan keuangan, ia bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya tidak hanya di hadapan manusia tetapi juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pancasila pertama, seorang akuntan bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, baik atau buruknya kebenaran yang dilakukan akuntan akan dicatat oleh-Nya sebagai suatu perbuatan baik atau buruk. Prinsip kedua berarti akuntan harus bertindak adil, dalam arti tidak boleh bertindak tidak jujur demi kepentingan satu kelompok dengan mengorbankan kelompok lain. Pada prinsip ketiga, penerapan semangat solidaritas dan persaudaraan akuntan tentunya diperlukan untuk mempererat hubungan antar departemen dalam suatu perusahaan atau kegiatan ekonomi.

Melalui semangat persaudaraan maka kesejahteraan ekonomi bangsa dan negara akan tercapai. Pancasila menganut sila keempat, yaitu pengambilan keputusan. Dalam tugasnya, akuntan tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak namun harus mempunyai pertimbangan yang matang agar keputusan tidak hanya terfokus pada tujuan perusahaan besar saja, namun juga perusahaan menengah dan kecil. Sebab profesi akuntan merupakan pihak yang netral dan obyektif dalam memberikan informasi atas laporan perusahaan manapun.

Prinsip kelima artinya akuntan harus berkontribusi terhadap kebahagiaan

masyarakat melalui profesinya atau kejujuran dalam pekerjaannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pancasila dalam akuntansi membawa banyak manfaat yang berbeda-beda seperti: semangat solidaritas, kepuasan batin, kegembiraan dan rasa syukur. Pancasila tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik saja, namun juga aspek intangible.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif. Metode penelitian kualitatif sering juga disebut metode penelitian natural karena penelitian dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting). Penelitian kualitatif mengutamakan makna. Penelitian bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Penelitian kualitatif memerlukan ketajaman analitis, objektivitas, sistematika, dan sistematika untuk mencapai ketepatan penafsiran, karena sifat suatu fenomena atau gejala yang mengikuti penelitian tersebut. Penelitian kualitatif bersifat holistik.

Menurut Sugiyono (2013: 53), metode deskriptif mendefinisikan sebagai berikut: "Rumusan masalah menyangkut pernyataan adanya variabel bebas, hanya pada variabel atau pada beberapa variabel (variabel bebas). Variabel yang dimaksud adalah variabel bebas, bukan variabel bebas, karena variabel bebas selalu berhubungan dengan variabel terikat). Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa metode analisis deskriptif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan atau peristiwa yang ada, dimana data yang digunakan adalah data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan tujuan penelitian. Data yang digunakan akan diolah, kemudian dari proses tersebut akan diambil kesimpulan.

Kajian ini memungkinkan kita untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang Akuntansi. Oleh karena itu pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder yang ada. Sumber primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, dan data sekunder merupakan sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain atau melalui dokumen data (Sugiyono, 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akuntansi Berdasarkan Sila "Ketuhanan yang Maha Esa"**

Definisi akuntansi berdasarkan sila Ketuhanan yang Maha Esa merupakan konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntansi dengan nilai-nilai keagamaan dan moral yang ada dalam ajaran agama yang dianut. Sila Ketuhanan yang Maha Esa adalah salah satu dari lima sila dalam Pancasila, yaitu dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Dalam konteks ini, akuntansi dipahami sebagai alat yang harus digunakan sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral yang tercermin

dalam sila tersebut. Berikut adalah definisi akuntansi berdasarkan sila Ketuhanan yang Maha Esa secara rinci:

**1. Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Moral dan Etika**

Akuntansi yang berdasarkan sila Ketuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya menjalankan prinsip-prinsip moral dan etika yang tinggi dalam pelaksanaan aktivitas akuntansi. Ini termasuk kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas akuntansi.

**2. Transparansi dan Akuntabilitas**

Definisi ini menekankan pentingnya transparansi dalam pelaporan keuangan dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Akuntansi yang sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa harus mencerminkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam penggunaan aset dan dana.

**3. Keadilan dan Keseimbangan**

Akuntansi harus mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Ini termasuk memperlakukan semua pihak dengan adil, termasuk pemegang saham, karyawan, klien, dan masyarakat secara umum.

**4. Penghindaran Kezaliman dan Korupsi**

Definisi akuntansi berdasarkan sila Ketuhanan yang Maha Esa menekankan penghindaran dari tindakan kezaliman, korupsi, dan penyalahgunaan keuangan. Akuntansi harus digunakan untuk mencegah segala bentuk tindakan tidak etis atau ilegal dalam pengelolaan sumber daya.

**5. Pencapaian Tujuan yang Diberkati**

Akuntansi yang sesuai dengan sila Ketuhanan yang Maha Esa harus digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diberkati dan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Ini bisa termasuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.

**Undang-Undang Terkait di Indonesia**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara: Undang-Undang ini mengatur prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan, yang mencakup prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal: Undang-Undang ini mengatur tentang transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia, yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang mencerminkan ketuhanan yang maha esa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Peraturan ini mengatur praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia dan mewajibkan integritas, etika, dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan pemerintah.
- Selain itu, akuntansi yang sesuai dengan sila Ketuhanan yang Maha Esa juga harus mendukung tujuan yang diberkati, yaitu pencapaian kesejahteraan dan keberkatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, praktik akuntansi juga harus

menjaga keberlanjutan lingkungan dan menjauhi segala bentuk tindakan korupsi atau penyalahgunaan keuangan.

### **Akuntansi Berdasarkan Sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”**

Definisi akuntansi berdasarkan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntansi dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan budaya yang tercermin dalam sila tersebut. Sila ini menekankan pentingnya memperlakukan semua individu dengan adil dan beradab dalam aktivitas akuntansi. Berikut adalah definisi akuntansi berdasarkan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta beberapa undang-undang terkait di Indonesia:

#### **1. Keadilan dan Keseimbangan**

Akuntansi yang berlandaskan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Ini mencakup pengakuan hak-hak semua pihak, termasuk pemegang saham, karyawan, klien, dan masyarakat secara umum. Prinsip ini harus menghindari perlakuan yang diskriminatif atau tidak adil terhadap kelompok tertentu.

#### **2. Penghormatan Terhadap Budaya**

Akuntansi harus mempertimbangkan budaya lokal dan norma-norma sosial yang ada di suatu wilayah atau negara. Ini mencakup penghormatan terhadap cara-cara berbisnis dan berakuntansi yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai setempat.

#### **3. Penghindaran Diskriminasi**

Praktik akuntansi harus menghindari segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Prinsip ini mencerminkan keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua individu.

#### **4. Transparansi dan Akuntabilitas**

Akuntansi harus mendorong transparansi dalam pelaporan keuangan dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Ini membantu memastikan bahwa semua pihak dapat memantau dan memahami penggunaan dana dengan jelas.

#### **Undang-Undang Terkait di Indonesia**

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara: Undang-Undang ini mengatur tentang pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Undang-Undang ini mengatur perseroan terbatas (PT) di Indonesia dan mengharuskan perusahaan untuk menjalankan praktik bisnis yang adil, serta memastikan transparansi dalam pelaporan keuangan mereka.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal: Undang-Undang ini mengatur praktik transparansi dan keseimbangan dalam pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia.

Definisi akuntansi berdasarkan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menggarisbawahi pentingnya memperlakukan semua individu dan entitas dengan adil, menjunjung tinggi keadilan, menghormati budaya setempat, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang beradab dan mendukung perkembangan masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan.

### **Akuntansi Berdasarkan Sila “Persatuan Indonesia”**

Akuntansi berdasarkan Sila Persatuan Indonesia adalah konsep akuntansi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntansi dengan nilai-nilai persatuan, kerukunan, dan keberagaman yang tercermin dalam sila tersebut. Sila Persatuan adalah salah satu dari lima sila dalam Pancasila, yaitu dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Dalam konteks ini, akuntansi harus mencerminkan nilai-nilai yang mempromosikan persatuan dan kerukunan antarwarga negara Indonesia, serta menghargai keberagaman budaya dan agama. Berikut adalah definisi akuntansi berdasarkan Sila Persatuan Indonesia, serta undang-undang terkait yang mendukung prinsip-prinsip ini:

#### **1. Penghormatan Terhadap Keberagaman**

Akuntansi yang berdasarkan Sila Persatuan Indonesia harus memahami dan menghormati keberagaman budaya, agama, suku, dan latar belakang lainnya yang ada di Indonesia. Ini mencakup pemahaman dan pengakuan terhadap keberagaman dalam praktik bisnis dan pelaporan keuangan.

#### **2. Transparansi dan Akuntabilitas**

Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam praktik akuntansi sangat penting. Akuntansi harus mencerminkan keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya keuangan dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

#### **3. Penghindaran Konflik dan Diskriminasi**

Praktik akuntansi harus menghindari menciptakan atau memperdalam konflik antarwarga negara dan tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti agama, suku, atau etnis.

#### **4. Pemupukan Kerukunan**

Akuntansi yang berlandaskan Sila Persatuan Indonesia harus berperan dalam memupuk kerukunan antarwarga negara. Praktik akuntansi dapat mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif serta mendukung semua lapisan masyarakat.

### **Undang-Undang Terkait di Indonesia**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Dasar Negara (UUD) adalah hukum dasar Indonesia yang mencakup prinsip-prinsip

Pancasila, termasuk Sila Persatuan. UUD menjadi landasan bagi seluruh hukum dan peraturan di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan akuntansi.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal: Undang-Undang ini mengatur praktik transparansi dan keseimbangan dalam pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia, yang mendukung prinsip Sila Persatuan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Undang-Undang ini mengatur praktik bisnis perseroan terbatas (PT) di Indonesia dan memastikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham serta nilai-nilai persatuan dalam bisnis.
- Definisi akuntansi berdasarkan Sila Persatuan Indonesia menekankan pentingnya mendukung persatuan, kerukunan, dan keberagaman dalam praktik bisnis dan akuntansi. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi peraturan dan undang-undang di Indonesia yang mengatur praktik akuntansi dan bisnis agar mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan.

### **Akuntansi Berdasarkan Sila “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan”**

Akuntansi berdasarkan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah konsep akuntansi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntansi dengan nilai-nilai demokrasi, keterbukaan, serta kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang tercermin dalam sila tersebut. Sila ini menekankan pentingnya melibatkan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan dan menjunjung tinggi hikmat serta kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya. Berikut adalah definisi akuntansi berdasarkan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta undang-undang terkait yang mendukung prinsip-prinsip ini:

#### **1. Partisipasi dan Keterbukaan**

Akuntansi yang berlandaskan Sila Kerakyatan harus mencerminkan prinsip partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya. Transparansi dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan adalah kunci dalam memungkinkan partisipasi yang efektif.

#### **2. Akuntabilitas dan Pengawasan**

Prinsip akuntabilitas harus diterapkan dengan kuat dalam praktik akuntansi. Ini mencakup pengawasan oleh perwakilan rakyat dan badan-badan yang mewakili masyarakat untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan secara efisien dan sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati.

#### **3. Kebijakan dan Pembangunan Berkelanjutan**

Akuntansi harus mendukung pengambilan kebijakan yang bijaksana dan berkelanjutan. Keputusan finansial harus didasarkan pada pemahaman yang baik tentang konsekuensi jangka panjang dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

### **Undang-Undang Terkait di Indonesia**

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara: Undang-Undang ini mengatur pemeriksaan keuangan negara dan menggarisbawahi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Undang-Undang ini mengatur pengelolaan keuangan negara dan proses perencanaan keuangan negara yang melibatkan peran perwakilan rakyat.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: Undang-Undang ini menekankan pentingnya keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik.

Akuntansi berdasarkan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan menegaskan pentingnya proses demokratis dalam pengelolaan sumber daya dan pembuatan keputusan keuangan. Prinsip-prinsip ini mendukung pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memberikan landasan bagi undang-undang terkait di Indonesia yang mengatur praktik akuntansi dalam konteks demokrasi dan perwakilan rakyat.

### **Definisi Akuntansi Berdasarkan Sila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”**

Akuntansi berdasarkan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah konsep akuntansi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntansi dengan nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak rakyat yang tercermin dalam sila tersebut. Sila ini menekankan pentingnya akuntansi untuk mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan merata serta perlindungan hak-hak rakyat. Berikut adalah definisi akuntansi berdasarkan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, serta undang-undang terkait yang mendukung prinsip-prinsip ini:

#### **1. Keadilan Ekonomi**

Akuntansi yang berlandaskan Sila Keadilan Sosial harus mencerminkan prinsip-prinsip distribusi kekayaan dan peluang yang lebih adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Ini mencakup perlindungan hak ekonomi dan sosial semua individu dan kelompok masyarakat.

#### **2. Perlindungan Konsumen dan Investor**

Akuntansi harus melibatkan perlindungan hak konsumen dan investor. Praktik akuntansi yang transparan dan akurat mendukung keputusan konsumen dan investor dalam lingkungan bisnis yang adil.

#### **3. Penghapusan Kemiskinan**

Praktik akuntansi harus berkontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Data keuangan yang akurat dapat membantu pemerintah

dan organisasi untuk merancang program-program yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Undang-Undang Terkait di Indonesia

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: UUD 1945 menjadi landasan hukum bagi nilai-nilai Pancasila, termasuk Sila Keadilan Sosial, yang menjadi pedoman dalam seluruh hukum dan peraturan di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional: Undang-Undang ini mengatur sistem jaminan sosial nasional yang mencakup perlindungan sosial bagi rakyat Indonesia, termasuk program-program yang berhubungan dengan kesejahteraan ekonomi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal: Undang-Undang ini mengatur praktik transparansi dan keseimbangan dalam pelaporan keuangan perusahaan publik, yang mendukung prinsip akuntansi yang adil dan menjunjung tinggi hak konsumen dan investor.

Akuntansi berdasarkan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menekankan pentingnya akuntansi dalam mendukung pembangunan ekonomi yang merata dan perlindungan hak-hak sosial ekonomi rakyat. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang mengatur praktik akuntansi dan perlindungan sosial di Indonesia.

### Akuntansi Berdasarkan “Perspektif Pancasila”

Setelah melakukan dekonstruksi definisi akuntansi terhadap masing-masing sila, maka penulis dapat menyimpulkan masing-masing definisi dalam tabel berikut ini: Berdasarkan penggambaran terhadap definisi akuntansi berdasarkan perspektif masing-masing sila Pancasila, dapat diambil suatu makna bahwa akuntansi tidak hanya mengenal unsur materi semata. Pendekatan ini memastikan bahwa akuntansi tidak hanya menjadi alat untuk mencatat transaksi keuangan, tetapi juga menjadi instrumen yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam akuntansi akan bervariasi tergantung pada situasi dan konteks tertentu, serta peraturan yang berlaku di Indonesia.

**Tabel 1. Definisi Akuntansi Berdasarkan Masing-Masing Sila Pancasila**

Sila	Dekonstruksi Definisi Akuntansi
I	Proses mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan kepada Tuhan
II	Proses memanusiakan manusia melalui suatu aktivitas keuangan
III	Proses menciptakan persaudaraan dalam kaitannya dengan kegiatan aktivitas keuangan
IV	Proses mengangkat derajat rakyat dalam segi aktivitas keuangan

V	Proses menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani manusia dalam hal aktivitas keuangan untuk membangun perekonomian berkerakyatan
---	--

Definisi memiliki peran kunci dalam membimbing tindakan manusia. Dalam konteks akuntansi, definisi menjadi dasar pemikiran dan prinsip-prinsip akuntansi. Di Indonesia, sayangnya, akuntansi sering kali terlalu terfokus pada aspek bisnis, dengan mengesampingkan nilai-nilai non-materi dan aspek humanis. Akibatnya, perkembangan konsep akuntansi lebih condong mendukung investor dan pemilik modal, sementara masyarakat kelas menengah ke bawah terabaikan.

Penelitian ini berupaya mendefinisikan ulang akuntansi dengan perspektif Pancasila. Hasilnya adalah definisi-definisi akuntansi berdasarkan masing-masing sila Pancasila, seperti pertanggungjawaban kepada Tuhan, humanisasi, semangat persaudaraan, peningkatan martabat rakyat, dan keseimbangan kebutuhan fisik dan mental manusia dalam aktivitas keuangan. Akuntansi dalam perspektif Pancasila mempertimbangkan unsur-unsur non-materi dan pertanggungjawaban kepada Tuhan dalam pengambilan keputusan serta praktiknya.

**Tabel 2 Manfaat yang Diperoleh dari Usaha**

No	Sila	Manfaat yang Diperoleh
1	Ketuhanan Yang Maha Esa	Uang, kepuasan batin, keikhlasan, rasa senang akan kehadiran Tuhan
2	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Uang, rasa senang, kepuasan hat
3	Persatuan Indonesia	Uang, solidaritas (rasa persaudaraan dan loyalitas)
4	Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan	Uang dan perasaan bebas
5	Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Uang, kepuasan batin, rasa senang, rasa syukur dan rasa ikhlas

## KESIMPULAN

Definisi berperan penting dalam mengarahkan tindakan manusia. Dalam akuntansi, definisi menjadi dasar pemikiran dan prinsip akuntansi. Namun, di Indonesia, konsep akuntansi cenderung terlalu fokus pada bisnis dan mengabaikan nilai-nilai non-materi serta sisi humanis manusia. Ini mengakibatkan perkembangan akuntansi yang lebih mendukung investor dan pemilik modal, dengan mengesampingkan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Penelitian ini mencoba mendefinisikan akuntansi dari perspektif Pancasila. Hasilnya adalah definisi akuntansi berdasarkan masing-masing sila Pancasila, seperti pertanggungjawaban kepada Tuhan, humanisasi, semangat persaudaraan, peningkatan martabat rakyat, dan keseimbangan kebutuhan fisik dan mental manusia dalam aktivitas keuangan. Akuntansi dalam perspektif Pancasila mempertimbangkan aspek non-materi dan pertanggungjawaban kepada Tuhan dalam pengambilan keputusan dan praktiknya.

## SARAN

Implementasi Pancasila dalam bidang akuntansi dapat dilakukan melalui berbagai cara. Berikut adalah beberapa contoh cara mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktik akuntansi:

- Keadilan: Prinsip keadilan Pancasila dapat diterapkan dalam pembukuan dan pelaporan keuangan. Pastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis diperlakukan secara adil dan setiap transaksi dicatat dengan akurat.
- Kemanusiaan: Selaras dengan nilai kemanusiaan Pancasila, praktik akuntansi harus mempertimbangkan dampaknya pada kesejahteraan dan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya keuntungan pribadi atau perusahaan.
- Kerakyatan: Menerapkan transparansi dalam pelaporan keuangan dan menjalankan proses akuntansi yang terbuka, sehingga pemangku kepentingan dapat memahami informasi keuangan perusahaan.
- Persatuan: Memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan laporan keuangan mencerminkan kepentingan bersama dan menghindari tindakan yang dapat memecah belah atau merugikan pihak lain.
- Kemandirian: Akuntansi harus mengedepankan prinsip-prinsip keuangan yang berkelanjutan, menjaga kemandirian dalam pengambilan keputusan ekonomi, dan tidak bergantung pada praktik-praktik yang merugikan lingkungan atau sumber daya alam.
- Kepentingan Nasional: Selaras dengan nilai ini, pengelolaan aset dan dana harus memperhatikan kepentingan nasional dan melibatkan prinsip-prinsip nasional dalam perencanaan dan pelaporan keuangan.
- Ketuhanan: Ketika mengelola aset dan dana, perusahaan harus mempertimbangkan tanggung jawab moral dan etika dalam praktik akuntansi, memastikan integritas dalam semua aktivitas keuangan.

Selain itu, perusahaan juga bisa mengikuti pedoman etika profesi akuntan yang telah ditetapkan oleh lembaga profesional akuntansi. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik akuntansi, perusahaan dapat mencapai tujuan bisnisnya sambil memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara secara lebih luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budastra Aditya Made, Sari Winanda Hesti, Budastra Ketut I. (2023). *Pentingnya Etika Dan Religiositas Dalam Membentuk Karakter Akuntan Yang Baik*. NO. 1. VOL. 4. Pattimura University. (2012). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menumbuhkembangkan Kesadaran Masyarakat Dapat Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional*. Anbom.
- Himpunan Manahasiswa Akuntansi. (2021). *Implementasi Pancasila Dalam Akuntansi*. Binus University.
- Sitorus, Jordan Hotman Ekklesia. (2015). *Membawa Pancasila Dalam Suatu Definisi Akuntansi*. Malang: No. 2. Vol. 6. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6021>.
- Sitorus Hotman Ekklesia Jordan. (2015).
- Sitorus, Jordan Hotman Ekklesia. (2015). *Dekonstruksi Definisi Akuntansi Dalam Perspektif Pancasila*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.